

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Bandung Barat. Periode penelitian dipilih dari tahun 2008 sampai 2018. Variabel penelitian antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Hotel (PH), Pajak Restoran (PR), Efektivitas Pajak Hotel (EPH), Kontribusi Pajak Hotel (KPH), Pertumbuhan Pajak Hotel (PPH), Efektivitas Pajak Restoran (EPR), Kontribusi Pajak Restoran (KPR), Pertumbuhan Pajak Restoran (PPR).

3.1.1 Pajak Hotel

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, tentang Pajak Hotel Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pengusaha hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2012 realisasi pajak hotel sebesar 1,435,132,025.00, jumlah terbesar efektivitas hotel sebesar 0,70% pada tahun 2012, sedangkan untuk kontribusi dari pajak hotel sebesar 0,55% pada tahun 2016, untuk pertumbuhan sendiri terbesar pada tahun

2010 sebesar 0,75%. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 3.1.1 dibawah ini:

Tabel 3.1.1
Pajak Hotel (Efektivitas, Kontribusi, Pertumbuhan) di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2018

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Efektivitas (%)	Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
2008	1.325.000.000	662.162.000	0,66	0,50	0,70
2009	2.543.950.000	1.271.475.000	0,68	0,40	0,71
2010	3.500.000.000	1.122.094.256	0,69	0,42	0,75
2011	3.745.000.039	1.382.279.874	0,67	0,43	0,69
2012	2.311.227.053	1.435.132.025	0,70	0,44	0,63
2013	565.664.824	250.366.475	0,61	0,46	0,60
2014	978.129.733	489.076.364	0,60	0,52	0,64
2015	7.750.000.000	1.942.342.020	0,55	0,51	0,68
2016	15.089.634.165	1.357.409.964	0,56	0,55	0,69
2017	15.575.672.428	1.323.223.425	0,57	0,52	0,67
2018	1.751.981.344	785.762.471	0,62	0,50	0,60

Sumber: LKPJ Bupati Bandung Barat Tahun 2006-2012, Bappeda KBB, diolah

Pada tabel 3.1.1 dapat dilihat bahwa Realisasi dari Pajak Hotel di Kabupaten Bandung Barat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun tertentu. Pada tahun 2015 nilai realisasi pajakhotel itu sendiri sebesar 1.942.342.020, hal ini menunjukkan bahwa nilai pajak hotel itu sendiri cukup berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 3.1.2
Pajak Hotel (Efektivitas, Kontribusi, Pertumbuhan) di Kabupaten Bandung) Tahun 2008-2018

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Efektivitas (%)	Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
2008	144.660.409.277	1.467.678.537	0,63	0,55	0,42
2009	152.549.655.824	1.954.420.909	0,51	0,57	0,47
2010	199.240.708.310	2.043.559.541	0,53	0,52	0,49
2011	291.079.862.460	2.453.416.214	0,56	0,45	0,51
2012	366.316.690.578	2.902.414.601	0,54	0,50	0,53
2013	137.532.499.196	1.458.103.087	0,56	0,60	0,50
2014	147.630.987.490	1.700.972.245	0,61	0,52	0,48
2015	159.885.000.000	1.861.418.584	0,63	0,61	0,64
2016	600.000.000	1.122.094.256	0,66	0,59	0,71
2017	1.250.000.000	1.382.279.874	0,68	0,54	0,69
2018	1.800.000.000	2.311.227.053	0,69	0,56	0,62

Sumber: LKPJ Bupati Bandung Barat Tahun 2006-2012, Bappeda KBB, diolah

Pada tabel 3.1.2 nilai efektivitas, kontribusi, pertumbuhan pajak hotel di daerah kabupaten Bandung selama tahun 2008-2018 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2012 sendiri nilai realisasi pajak hotel menyentuh angka 2.902.414.601, artinya antara variabel tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) baik nilai efektivitas, kontribusi, dan pertumbuhan di daerah kabupaten Bandung itu sendiri.

Tabel 3.1.3
Pajak Hotel (Efektivitas, Kontribusi, Pertumbuhan) di Kota Bandung) Tahun 2008-2018

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Efektivitas (%)	Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
2008	44.521.528.069	26.103.431.700	0,59	0,54	0,40
2009	58.585.727.582	21.087.954.435	0,36	0,30	0,43
2010	65.047.768.797	16.663.702.588	0,26	0,41	0,50
2011	72.085.375.481	11.668.650.015	0,31	0,34	0,53
2012	87.351.762.348	11.616.090.321	0,41	0,25	0,55
2013	111.314.519.983	16.507.504.020	0,51	0,30	0,60
2014	143.258.105.149	18.453.207.895	0,53	0,20	0,62
2015	11.477.229.807	9.937.686.526	0,56	0,40	0,65
2016	15.790.180.070	12.349.978.810	0,62	0,45	0,67
2017	19.995.781.467	17.263.640.386	0,66	0,51	0,70
2018	22.540.126.656	20.679.002.428	0,71	0,60	0,75

Sumber: LKPJ Bupati Bandung Barat Tahun 2006-2012, Bappeda KBB, diolah

Pada tabel 3.1.3 antara nilai efektivitas, kontribusi, pertumbuhan pajak hotel di kota Bandung juga mengalami perubahan yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini disebabkan, karena di kota Bandung sendiri dari tahun ke tahun dapat kita lihat sangat cepat dibangun nya hotel-hotel yang baru disamping restoran yang ada dimana-mana. Pada tahun 2008 nilai realisasi pajak hotel di kota bandung mencapai angka terbesar yaitu 26.103.431.700.

Tabel 3.1.4
Pajak Hotel (Efektivitas, Kontribusi, Pertumbuhan) di Kota Cimahi
Tahun 2008-2018

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Efektivitas (%)	Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
2008	17.045.275.299	16.710.740.857	0,66	0,34	0,39
2009	38.340.000.000	37.613.533.717	0,77	0,54	0,25
2010	49.307.000.000	47.753.989.389	0,45	0,65	0,40
2011	82.808.464.299	91.644.684.568	0,46	0,44	0,49
2012	49.307.000.000	91.795.256.385	0,51	0,55	0,56
2013	82.808.464.299	112.124.306.126	0,41	0,59	0,57
2014	96.904.518.376	357.318.600.587	0,34	0,62	0,67
2015	101.252.243.865	477.413.387.245	0,61	0,56	0,50
2016	149.809.285.414	684.364.616.06	0,56	0,50	0,66
2017	200.160.186.242	914.379.564	0,60	0,51	0,48
2018	267.434.024.839	1.221.702.535	0,64	0,44	0,66

Sumber: LKPJ Bupati Bandung Barat Tahun 2006-2012, Bappeda KBB, diolah

Pada tabel 3.1.4 nilai efektivitas, kontribusi, pertumbuhan pajak hotel di kota cimahi dari tahun 2008-2018 mengalami perubahan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) meskipun tidak sebesar di kota Bandung. Di daerah kota Cimahi sendiri nilai realisasi pajak hotel terbesar pada tahun 2015 sebesar 477.413.387.245, hal ini menunjukkan dari tahun ke tahun pajak hotel itu sendiri cukup berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Cimahi.

3.2.1 Pajak Restoran

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.

Subyek pajak restoran adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, rumah makan, depot, dan warung. Obyek pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran, rumah makan, depot, dan warung.

Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten/kota yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.

Tabel 3.2.1
Pajak Restoran (Efektivitas, Kontribusi, Pertumbuhan) di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2018

Tahun	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Efektivitas (%)	Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
2008	69.325.700.000	16.272.050.000	0,52	0,60	0,61
2009	111.418.999.229	21.845.545.000	0,54	0,61	0,63
2010	137.532.499.196	23.690.000.000	0,57	0,65	0,67
2011	147.630.987.490	54.476.148.000	0,54	0,54	0,60
2012	144.660.409.277	6.894.597.594	0,57	0,59	0,62
2013	8.978.077.631	605.533.697	0,47	0,58	0,64
2014	9.479.561.814	1.475.160.077	0,51	0,63	0,67
2015	8.675.000.000	3.059.221.826	0,59	0,66	0,69
2016	44.585.228.965	1.391.205.279	0,60	0,65	0,68
2017	6.750.000.000	1.946.015.737	0,62	0,64	0,60
2018	2.377.621.571	889.482.164	0,61	0,53	0,58

Sumber: LKPJ Bupati Bandung Barat Tahun 2006-2012, Bappeda KBB, diolah

Berdasarkan data yang diperoleh, hasil dari Realisasi Pajak Restoran setiap tahunnya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pertumbuhan pajak restoran di kabupaten bandung barat terbesar pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,62%. Kontribusi pajak restoran sendiri terbesar pada tahun 2015 sebesar 0,66%. Nilai realisasi pajak restoran sendiri terbesar pada tahun 2011 yaitu 54.476.148.000 di kabupaten Bandung Barat.

Tabel 3.2.2
Pajak Restoran (Efektivitas, Kontribusi, Pertumbuhan) di Kabupaten
Bandung Tahun 2008-2018

Tahun	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Efektivitas (%)	Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
2008	780.000.000	6.021.292.301	0,51	0,55	0,59
2009	910.000.000	5.823.722.900	0,54	0,59	0,61
2010	1.135.000.000	6.253.301.724	0,57	0,62	0,64
2011	1.550.000.000	627.131.081	0,59	0,66	0,60
2012	1.800.000.000	658.901.740	0,60	0,65	0,58
2013	2.150.000.000	794.123.301	0,47	0,69	0,56
2014	1.400.000.000	1.901.293.340	0,59	0,64	0,41
2015	5.910.799.000	2.403.855.604	0,62	0,70	0,49
2016	1.858.701.200	2.372.114.450	0,64	0,72	0,44
2017	1.894.603.511	1.925.501.711	0,59	0,68	0,54
2018	595.110.820	67.247.135	0,58	0,58	0,50

Sumber: LKPJ Bupati Bandung Barat Tahun 2006-2012, Bappeda KBB, diolah

Pada tabel 3.2.2 menunjukkan bahwa nilai efektivitas pajak restoran di kabupaten Bandung tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,64%, sedangkan nilai kontribusi sendiri tertinggi sebesar 0,72% dan nilai pertumbuhan senilai 0,64% pada tahun 2010. Nilai realisasi pajak restoran sendiri terbesar pada tahun 2010 6.253.301.724 di kabupaten bandung, hal ini menunjukkan nilai pajak restoran cukup berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Tabel 3.2.3
Pajak Restoran (Efektivitas, Kontribusi, Pertumbuhan) di Kota
Bandung Tahun 2008-2018

Tahun	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Efektivitas (%)	Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
2008	56.916.009.253	214.397.508.439	0,49	0,60	0,64
2009	66.601.904.605	19.262.681.588	0,59	0,55	0,52
2010	73.573.789.261	2.440.160.970	0,60	0,40	0,39
2011	82.553.764.760	3.115.296.523	0,54	0,44	0,42
2012	95.212.432.864	3.666.693.409	0,44	0,49	0,48
2013	56.306.150.866	4.332.088.946	0,39	0,45	0,51
2014	65.625.442.641	4.953.940.629	0,40	0,50	0,54
2015	74.971.580.148	5.098.071.916	0,38	0,48	0,59
2016	84.299.820.501	5.685.213.859	0,42	0,46	0,61
2017	93.632.535.142	6.503.784.682	0,45	0,51	0,66
2018	102.965.249.783	6.672.618.474	0,50	0,55	0,58

Sumber: LKPJ Bupati Bandung Barat Tahun 2006-2012, Bappeda KBB, diolah

Pada tabel 3.2.3 nilai efektivitas pajak restoran terbesar pada tahun 2010 sebesar 0,60%, nilai kontribusi sendiri sebesar 0,60% pada tahun 2008, dan nilai pertumbuhan sebesar 0,66% pada tahun 2017. Nilai realisasi pajak restoran sendiri terbesar pada tahun 2009 sebesar 19.262.681.588, hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran cukup berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di daerah kota Bandung.

Tabel 3.2.4
Pajak Restoran (Efektivitas, Kontribusi, Pertumbuhan) di Kota
Cimahi Tahun 2008-2018

Tahun	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Efektivitas (%)	Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
2008	131.151.600	15.919.330.572	0,39	0,15	0,40
2009	950.000.000	1.879.545.033	0,49	0,45	0,29
2010	1.602.000.000	19.711.985.34	0,42	0,40	0,34
2011	2.000.000.000	42.613.533.717	0,48	0,44	0,50
2012	2.664.000.000	63.753.989.389	0,39	0,56	0,71
2013	3.750.000.000	91.644.684.568	0,66	0,66	0,44
2014	4.238.083.103	91.795.256.385	0,63	0,60	0,49
2015	4.693.787.000	112.124.306.126	0,69	0,65	0,47
2016	4.893.788.000	112.060.908.223	0,59	0,46	0,40
2017	8.461.923.100	111.367.796.978	0,64	0,48	0,39
2018	9.333.505.400	132.108.046.124	0,54	0,45	0,41

Sumber: LKPJ Bupati Bandung Barat Tahun 2006-2012, Bappeda KBB, diolah

Pada tabel 3.2.4 menunjukkan bahwa nilai efektivitas pajak restoran di kota cimahi juga mengalami perubahan yang cukup signifikan terbesar 0,69% pada tahun 2015, nilai kontribusi pada tahun 2013 sebesar 0,66%, dan nilai pertumbuhan sebesar 0,71% pada tahun 2012. Nilai realisasi pajak restoran itu sendiri terbesar pada tahun 2018 yaitu 132.108.046.124, hal ini menunjukkan bahwa nilai pajak restoran di kota cimahi cukup signifikan di kota Cimahi.

3.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pasal 6 menyebutkan bahwa sumber-sumber PAD terdiri dari:

Pajak Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak, retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa pembayar retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarnya.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi).

Tabel 3.3.2
Nilai (PAD) di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2018

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Nilai PAD (%)
2008	144.660.409.277	96.992.244.069	58,66
2009	152.549.655.824	112.724.490.788	56,98
2010	199.240.708.310	153.633.100.166	54,67
2011	291.079.862.460	209.598.193.886	75,65
2012	366.316.690.578	261.447.992.441	78,33
2013	1.036.037.003	176.874.685.841	81,74
2014	531.743.826	245.795.835.592	68,09
2015	271.247.848.116	284.203.549.356	69,24
2016	1.665.937.055	342.227.266.893	70,09
2017	758.374.086	523.102.522.332	72,17
2018	372.190.942	272.039.808	73,09

Sumber: LKPJ Bupati Bandung Barat Tahun 2006-2012, Bappeda KBB, diolah

Berdasarkan data yang diperoleh, hasil dari realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) setiap tahunnya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dengan jumlah terbesar pada tahun 2017 sebesar 523,102,522,332 , dan nilai PAD sendiri terbesar pada tahun 2013 sebesar 81, 74%.

Tabel 3.3.3
Nilai (PAD) di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2018

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Nilai PAD (%)
2008	144.660.409.277	51.654.333.709.60	35,71
2009	601.057.958.783	416.896.030.531	26,76
2010	1.436.030.875	1.086.282.65	9,72
2011	291.062.396.560	32.791.380.684	47,34
2012	366.316.690.578	41.045.068.255	50,81
2013	507.243.684.131	49.547.220.662	56,73
2014	702.045.372.759	30.590.439.477	42,53
2015	784.216.215.215	31.267.911.902	43,36
2016	856.514.244.254	26.937.588.476	44,45
2017	762.256.352.461	27.377.348.706	43,26
2018	813.568.015.668	26.806.281.905	46,51

Sumber: LKPJ Bupati Bandung Barat Tahun 2006-2012, Bappeda KBB, diolah

Pada tabel 3.3.3 menunjukkan bahwa realisasi PAD terbesar di kabupaten Bandung pada tahun 2018 sebesar 51.654.333.709.60 dan nilai PAD

terbesar pada tahun 2013 sebesar 56,73% di kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Kontribusi terhadap PAD sangat berpengaruh.

Tabel 3.3.4
Nilai Kontribusi (PAD) di Kota Bandung Tahun 2008-2018

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2008	314.627.155.412	73.832.886.129	68,14
2009	49.657.867.201	14.216.585.300	17,32
2010	2.440.160.98	912.572 .654	18,11
2011	833.254.175.288	71.684.532.455	80,06
2012	1.005.583.424.429	78.649.880.372	81,6
2013	1.442.775.238.323	115.308.351.284	82,76
2014	1.716.057.298.378	99.192.319.387	81,56
2015	1.859.694.643.505	64.985.847.830	80,34
2016	2.152.755.704.962	92.006.779.460	79,42
2017	3.065.143.012.234	262.678.023.845	78,3
2018	3.397.309.517.811	230.000.000.000	77,83

Sumber: LKPJ Bupati Bandung Barat Tahun 2006-2012, Bappeda KBB, diolah

Pada tabel 3.3.4 menunjukkan bahwa nilai realisasi PAD terbesar pada tahun 2018 sebesar 230.000.000.000 dan nilai PAD sendiri sebesar 80,06% pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa nilai PAD di kota Bandung cukup berpengaruh setiap tahun nya.

Tabel 3.3.5
Nilai (PAD) di Kota Cimahi Tahun 2008-2018

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2008	64.964.960.822	38.341.248.192	24,5
2009	66.190.680.359	6.656.601.925	26,71
2010	333.439.658	499.668.632	14,1
2011	116.677.729.308	8.381.624.811	36,52
2012	144.540.602.338	9.229.402.032	44,11
2013	191.599.456.904	10.226.084.489	47,83
2014	227.949.120.181	12.317.132.901	40,27
2015	268.807.074.332	9.856.337.459	41,71
2016	286.049.615.484	9.750.932.968	39,18
2017	270.337.189.779	8.418.886.362	41,2
2018	324.610.315.109	12.578.133.468	40,7

Sumber: LKPJ Bupati Bandung Barat Tahun 2006-2012, Bappeda KBB, diolah

Pada Tabel 3.3.5 menunjukkan bahwa nilai realisasi PAD terbesar pada tahun 2008 senilai 38.341.248.192, sedangkan nilai PAD sendiri sebesar 47,83% pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa nilai PAD di kota cimahi cukup berpengaruh setiap tahun nya.

3.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif ini menggambarkan mengenai kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bandung Raya saat ini dilihat dari seberapa besar pajak hotel & pajak restoran dan retribusi daerah saat ini, serta metode kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan pajak hotel & pajak restoran dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil perhitungan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran akan memberikan gambaran besaran kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD serta perkembangan kontribusinya dari tahun ke tahun.

Untuk menghitung pertumbuhan dari penerimaan pendapatan daerah Bandung Raya digunakan rumus sebagai berikut:

$$g(x_i) = \frac{x_{i,t} - x_{i,t-1}}{x_{i,t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$g(x_i)$ = Pertumbuhan pajak daerah jenis i

$x_{i,t}$ = Jumlah jenis pajak daerah tahun ke t .

$x_{i,t-1}$ = Jumlah jenis pajak daerah tahun ke $t - 1$.

Untuk mengetahui apakah suatu pemungutan pajak dikatakan efektif harus diperlukan suatu kriteria sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat ke-efektivan suatu pajak maka rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak}}{\text{Target penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD digunakan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

Pn: Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD

QXn : Jumlah Penerimaan pajak hotel dan pajak restoran

QYn : Jumlah PAD

n : Tahun (periode) tertentu.

3.7 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperoleh adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh lembaga pengumpulan data. Adapun data yang digunakan penelitian ini diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan/atau dipublikasikan oleh Bappeda Jabar, Bappeda Kabupaten Bandung Barat, dan instansi terkait lainnya.

3.8 Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014), variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Variabel Dependent

Variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independent. Dalam penelitian ini variabel dependentnya adalah Pendapatan Asli Daerah.

2. Variabel Independent

Variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi masing-masing variabel dependent. Adapun dalam penelitian ini variabel bebas dengan notasinya masing-masing sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Pajak Hotel (PPH)
- b. Efektifitas Pajak Hotel (EPH)
- c. Kontribusi Pajak Hotel (KPH)
- d. Pertumbuhan Pajak Restoran (PPR)
- e. Efektifitas Pajak Restoran (EPR)
- f. Kontribusi Pajak Restoran (KPR)

Operasional variabel adalah definisi dari variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dan menunjukkan cara pengukuran dari masing – masing variabel tersebut. Pada setiap indikator dihasilkan dari data sekunder dan dari suatu perhitungan terhadap formulasi yang mendasar pada konsep teori. Definisi dan operasional variabel bertujuan untuk menjelaskan makna variabel yang sedang diteliti. Adapun operasional variabel dari penelitian ini dalam bentuk dibawah ini :

Tabel 3.8.1

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

No	Nama Variabel	Definisi Variabel	Satuan
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Rupiah/Tahun
2.	Pajak Hotel (PH)	Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10.	Rupiah/Tahun
3.	Pajak Restoran (PR)	Pungutan di daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu.	Rupiah/Tahun

3.8.2 Metode Analisis Data yang Digunakan

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan metode analisis regresi linier berganda. Analisis ini merupakan

No	Nama Variabel	Definisi Variabel	Satuan
4.	Pertumbuhan Pajak Hotel (PPH)	Pertumbuhan pajak yaitu peningkatan atau penurunan pajak hotel dari periode sebelumnya ke periode berikutnya yang dinyatakan dalam bentuk persentase.	%/Tahun
5.	Efektivitas Pajak Hotel (EPH)	Efektivitas pajak (Tax Effectiveness) merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk menilai administrasi perpajakan daerah secara keseluruhan, khususnya dibidang pajak hotel.	%/Tahun
6.	Kontribusi Pajak Hotel (KPH)	Analisis kontribusi adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk menghitung potensi pungutan dari berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah dari sisi tingkat sumbangannya (mulyanto, 2007) termasuk pada pemasukan pajak hotel.	%/Tahun
7.	Pertumbuhan Pajak Restoran (PPR)	Pertumbuhan pajak yaitu peningkatan atau penurunan pajak restoran dari periode sebelumnya ke periode berikutnya yang dinyatakan dalam bentuk persentase.	%/Tahun
8.	Efektivitas Pajak Restoran (EPR)	Jumlah penerimaan pajak yang telah direncanakan. Dengan demikian efektivitas pajak (Tax Effectiveness) merupakan ukuran yang	%/Tahun

suatu
metode
yang

		dapat dipergunakan untuk menilai administrasi perpajakan daerah secara keseluruhan, khususnya di bidang pajak restoran.	
9.	Kontribusi Pajak Restoran (KPR)	Analisis kontribusi adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk menghitung potensi pungutan dari berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah dari sisi tingkat sumbangannya, termasuk pada pemasukan pajak restoran.	%/Tahun

digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel. Hubungan tersebut dapat dijelaskan dalam bentuk persamaan yang menghubungkan variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. Dalam penelitian ini, hubungan antar variabel tersebut diformulasikan ke dalam bentuk sebagai berikut :

$$\text{PAD} = f(\text{PHP}, \text{PHE}, \text{PHK}, \text{PPR}, \text{EPR}, \text{PPR} \dots \dots \dots \text{ (3.8.2)})$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PPH = Pertumbuhan Pajak Hotel

EPH = Efektivitas Pajak Hotel

KPH = Kontribusi Pajak Hotel

PPR = Pertumbuhan Pajak Restoran

EPR = Efektivitas Pajak Restoran

KPR = Kontribusi Pajak Restoran

Dari formulasi di atas, maka model untuk analisis regresi dengan menggunakan pendekatan OLS adalah sebagai berikut :

$$\text{PAD} = \beta_0 + \beta_1 \text{KPHit} + \beta_2 \text{PPHit} + \beta_3 \text{EPHit} + \beta_4 \text{PPHit} + \beta_5 \text{KPRit} + \beta_6 \text{PPRit} + \beta_7 \text{EPRit} + e \dots\dots\dots(3.8.2)$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah (Rp / Tahun)

β_0 = *Intercept* (Konstanta)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7$ = Koefisien Regresi Variabel Bebas

KPH = Kontribusi Pajak Hotel (% / Tahun)

PPH = Pertumbuhan Pajak Hotel (% / Tahun)

EPH = Efektivitas Pajak Hotel (% / Tahun)

KPR = Kontribusi Pajak Restoran (% / Tahun)

PPR = Pertumbuhan Pajak Restoran (% / Tahun)

EPR = Efektivitas Pajak Restoran (% /Tahun)

e = *error term*

Konsep dari metode OLS adalah menduga koefisien regresi (β_i) dengan meminimumkan residual. OLS dapat menduga koefisien regresi dengan baik, karena : (1) memiliki sifat tidak bias dengan varian yang minimum, (2) variabelnya konsisten dimana dengan meningkatnya ukuran sampel maka koefisien regresi mengarah pada nilai populasi yang sebenarnya, dan (3) koefisien regresinya terdistribusi secara normal (Gujarati, 2012).

3.9 Pengujian Asumsi Klasik

3.9.1 Uji Statistik

Uji statistik terhadap regresi berganda. Untuk membuktikan hipotesis ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan maka dilakukan uji F dan uji t.

3.9.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menyatakan bahwa linear sempurna diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari koefisien masing-masing variabel bebas. Jika koefisien korelasi diantara masing-masing variabel bebas lebih dari 0,8 maka terjadi multikolinearitas dan sebaliknya, jika koefisien korelasi antara masing-masing variabel bebas kurang dari 0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Hipotesis yang digunakan dalam uji multikolinearitas yaitu :

H_0 = Tidak terdapat multikolinearitas

H_1 = Terdapat multikolinearitas

Melalui pengujian kriteria sebagai berikut :

Jika nilai koefisien korelasi $> 0,8$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat multikolinearitas.

Jika nilai koefisien korelasi $< 0,8$ maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat multikolinearitas.

3.9.3 Uji Heteroskedastis

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model pengamatan terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka dapat dikatakan homokedastisitas yang merupakan syarat suatu model regresi.

Hipotesis dalam uji heteroskedastisitas yaitu :

H_0 = Tidak terdapat heteroskedastisitas

H_1 = Terdapat heteroskedastisitas

Melalui pengujian kriteria sebagai berikut :

Jika P value $\leq 5\%$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat heteroskedastisitas.

Jika P value $\geq 5\%$ maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat heteroskedastisitas.

3.9.4 Uji Autokorelasi

Salah satu asumsi model regresi linier adalah tidak adanya autokorelasi. Autokorelasi adalah korelasi antara sesama urutan pengamatan dari waktu ke waktu. Tujuan dari uji autokorelasi ini adalah untuk menguji apakah dalam suatu regresi linier ada korelasi antara residual pada periode t dengan periode t-1. Jika

terjadi autokorelasi maka dalam persamaan regresi linier tersebut terdapat masalah, karena hasil yang baik seharusnya tidak ada indikasi autokorelasi. Untuk memeriksa adanya autokorelasi biasanya menggunakan metode Durbin-Watson (DW) dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Tidak ada autokorelasi

H_1 = Terdapat autokorelasi

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat dilihat dari nilai DW dan tingkat signifikan (α) = 5%, dengan kriteria sebagai berikut:

Jika $d < d_L$, maka H_0 ditolak : artinya terdapat serial korelasi positif antar variabel.

- a. Jika $d > d_L$, maka H_0 diterima : artinya terdapat serial korelasi negatif antar variabel.
- b. Jika $d_U < d < 4 - d_U$, maka H_0 diterima : artinya tidak terdapat serial korelasi positif maupun negatif antar variabel.
- c. Jika $d_L < d < d_U$ atau $4 - d_U < d < 4 - d_L$: artinya tidak dapat diambil kesimpulan.

3.10 Pengujian Statistik

3.10.1 Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel *independen* secara individu terhadap variabel *dependen*. Uji t ini merupakan pengujian koefisien regresi masing-masing variabel *independen*

terhadap variabel *dependen* untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen*.

Perumusan hipotesis statistik, antara hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) selalu berpasangan, bila salah satu ditolak maka yang lain pasti diterima sehingga dapat dibuat keputusan yang tegas, yaitu apabila H_0 ditolak pasti H_1 diterima (Sugiyono,2012:87). Untuk menguji pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* dapat dibuat hipotesa :

$H_0 : \beta = 0$: Terdapat pengaruh antar variabel lain

$H_1 : \beta \neq 0$:Tidak terdapat pengaruh antar variabel lain

Keterangan:

Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan ketentuan sebagai berikut :

t statistik < t tabel : artinya hipotesa nol (H_0) diterima dan hipotesa alternatif (H_1) ditolak yang menyatakan bahwa variabel *independen* secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel *dependen*.

t statistik > t tabel : artinya hipotesa nol (H_0) ditolak dan hipotesa alternatif (H_1) diterima yang menyatakan bahwa variabel *independen* secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel *dependen*.

3.10.2 Uji Statistik F

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan derajat signifikan nilai F.

$$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots = 0$$

$$H_1 : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots \neq 0$$

Keterangan :

Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan ketentuan sebagai berikut :

F statistik < F tabel : Artinya hipotesa nol (H_0) diterima dan hipotesa alternatif (H_1) ditolak yang menyatakan bahwa variabel independen secara bersama tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

F statistik > F tabel : Artinya hipotesa nol (H_0) ditolak dan hipotesa alternatif (H_1) diterima yang menyatakan bahwa variabel independen secara bersama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

3.10.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel *dependen*. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel *independen* dalam menjelaskan variasi variabel *dependen* amat terbatas. Sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel *independen* memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel *dependen*.